

TESIS

**DETERMINAN OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH
DI SULAWESI BARAT DENGAN PERILAKU PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Sebuah Pendekatan Prinsip Value for money

*Detrminants of Optimization of Regional Asset Management in West Sulawesi
with User Behavior of Regonal Asset as A Moderation variable
A Value for Money Principle Approach*

**MUHAMMAD IRWANDI
A042192010**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**DETERMINAN OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH
DI SULAWESI BARAT DENGAN PERILAKU PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Sebuah Pendekatan *Prinsip Value for money***

*Detrminants of Optimization of Regional Asset Management in West Sulawesi
with User Behavior of Regonal Asset as A Moderation variable
A Value for Money Principle Approach*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD IRWANDI
A042192010**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

DETERMINAN OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH DI SULAWESI BARAT DENGAN PERILAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI *Sebuah Pendekatan *Prinsip Value for money**

*Detrminants of Optimization of Regional Asset Management in West Sulawesi
with User Behavior of Regonal Asset as A Moderation variable
A Value for Money Principle Approach*

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD IRWANDI
A042192010

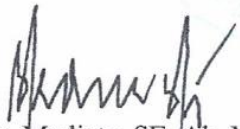
telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 22 Agustus 2022


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

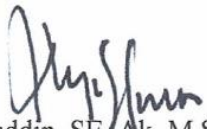
Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196509251990022001

Pembimbing Pendamping,


Dr. Muhammad Toaha, SE., M.BA.
NIP. 196012311986011008

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,


Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196704141994121001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Irwandi**

NIM : **A042192010**

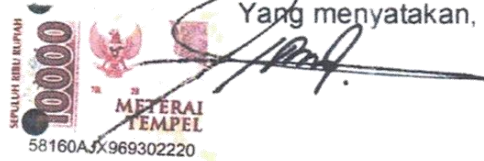
Program Studi : **Magister Keuangan Daerah**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : ***Determinan Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Sulawesi Barat Dengan Perilaku Pengguna Barang Milik Daerah Sebagai Variabel Moderasi Sebuah Pendekatan Prinsip Value For Money***

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Irwandi

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak.,M.Si., CA dan Dr. Muhammad Toaha, SE., M.BA, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;

6. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
7. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Aparat Lembang terkait dan mahasiswa Fakultas Manajemn Keuangan Daerah..

Makassar, Agustus 2022

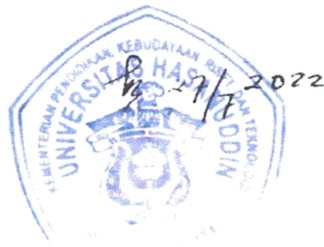
Peneliti

ABSTRAK.

MUHAMMAD IRWANDI. **Determinan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sulawesi Barat dengan Perilaku Pengguna Barang Milik Daerah Sebagai Variabel Moderasi: Sebuah Pendekatan Prinsip Value for Money** (dibimbing oleh Mediaty dan Muhammad Toaha).

Biro umum menjadi penanggung jawab atas barang yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang dimulai dari pimpinan, dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, para asisten sekretaris daerah, dan para staf ahli gubernur serta staf pada biro umum. Dengan banyaknya barang milik daerah (BMD) serta anggaran yang dikelola biro umum, ingin diketahui efektivitas penggunaan BMD tersebut dan dapat berdaya guna dalam mendukung tugas pokok dan fungsi biro umum. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan dan pemeliharaan BMD dan kedua faktor tersebut setelah dimoderasi oleh perilaku pengguna BMD. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Kami menemukan, pada perencanaan dan pemeliharaan BMD terdapat hubungan dan berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan BMD. Perilaku pengguna BMD tidak memoderasi perencanaan dan pemeliharaan BMD terhadap optimalisasi pengelolaan BMD.

Kata kunci: optimalisasi pengelolaan barang milik daerah, perencanaan barang milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah



ABSTRACT

MUHAMMAD IRWANDI. *Determinants of Optimization of Regional Asset Management in West Sulawesi with User Behavior of Regional Asset as A Moderation Variable: A Value for Money Principle Approach* (supervised by **Mediaty** and **Muhammad Toaha**)

The General Bureau is responsible for the goods which are the main task and functions starting from the leadership in this case the Governor, Deputy Governor, Regional Secretaries, Assistant Regional Secretaries and Expert Staff the Governor and staff at the General Bureau. With so many BMDs and budgets managed by General Bureau, the author wants to see how effective the use of BMD in supporting the Main Duties and Functions of the General Bureau. This study aims to determine and analyze the effect of planning and maintenance of Regional Asset (BMD), as well as the two factors after being moderated by the behavior of users of Regional Asset (BMD). This study used a quantitative approach with hypothesis testing. The results show that there is a relationship between Regional Asset (BMD) planning and maintenance that has a positive effect on the optimization of BMD management. The behavior of users of Regional Asset (BMD) does not moderate the planning and maintenance of Regional Asset to optimize the management of Regional Asset.

Keywords: Optimization of Regional Asset Management, Regional Asset Planning, Regional Asset Maintenance



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Teoretis	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	9
2.1.1 <i>Pengertian dan Peranan Aset Daerah</i>	9
2.1.2 Prinsip Value for money.....	10
2.1.3 Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)	13
2.1.4 Teori Kontingensi	16
2.1.5 Efektifitas Pengelolaan BMD	20
2.1.6 Efektivitas Pengelolaan BMD	21
2.2 Tinjauan Empiris	21

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1	Kerangka Pemikiran.....	27
3.2	Hipotesis.....	29
3.2.1	Pengaruh Perencanaan terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD.....	29
3.2.2	Pengaruh Perencanaan Terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD Setelah di moderasi oleh perilaku.....	30
3.2.3	Pengaruh Pemeliharaan Terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD Setelah di moderasi oleh perilaku.....	30
3.2.4	Pengaruh Pemeliharaan Terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD Setelah <i>dimoderasi</i> oleh Perilaku Pengguna BMD.....	32

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1	Rancangan Penelitian.....	33
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
4.3	Populasi dan Sampel.....	33
4.4	Jenis dan Sumber Data.....	34
4.5	Metode Pengumpulan Data.....	34
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	34
4.6.1	Variabel Penelitian.....	34
4.6.2	Definisi Operasional.....	35
4.7	Instrumen Penelitian.....	39
4.8	Teknik Analisis Data.....	41

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1	Deskripsi Data.....	46
5.2	Uji Kualitas Data.....	48
5.3	Analisis Variabel	51
5.4	Uji Asumsi Klasik.....	55
5.5	Analisis Data.....	61

5.6	Analisis Regresi.....	68
5.7	Interprestasi Hasil.....	76
BAB VI PEMBAHASAN		
6.1	Pengaruh Perencanaan BMD terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD.....	82
6.2	Pengaruh Pemeliharaan BMD terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD.....	86
6.3	Interaksi Perencanaan BMD dengan Perilaku terhadap Pengguna BMD terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD	89
6.4	Interaksi Pemeliharaan BMD dengan Perilaku terhadap Pengguna BMD terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD	93
BAB VII PENUTUP		
7.1	Kesimpulan.....	82
7.2	Implikasi.....	83
7.3	Keterbatasan	84
7.4	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Barang Milik Daerah pada Biro Umum 3
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu 22
Tabel 4.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 38
Tabel 4.2	Jenis-jenis Variabel Moderasi 44
Tabel 5.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 46
Tabel 5.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden..... 47
Tabel 5.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Pengabdian (Tahun) 47
Tabel 5.4	Hasil Uji Validitas Kuesioner 49
Tabel 5.5	Hasil Uji Reliabilitas 51
Tabel 5.6	Distribusi Persepsi Responden Mengenai Perencanaan BMD 52
Tabel 5.7	Distribusi Persepsi Responden Mengenai Pemeliharaan BMD 53
Tabel 5.8	Distribusi Persepsi Responden Mengenai Perilaku Pengguna BMD..... 54
Tabel 5.9	Distribusi Persepsi Responden Mengenai Optimalisasi Pengelolaan BMD..... 55
Tabel 5.10	Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 56
Tabel 5.11	Hasil SPSS Uji Autokorelasi..... 59
Tabel 5.12	Hasil Uji Multikolinearitas. 60
Tabel 5.13	Hasil Uji Korelasi 61
Tabel 5.14	Koefisien Determinasi 63
Tabel 5.15	Hasil Uji F 64
Tabel 5.16	Hasil Uji t Variabel Bebas, Variabel Moderasi dan Variabel Interaksi 66
Tabel 5.17	Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Variabel Bebas Terhadap variabel Terikat Tanpa Variabel Moderasi 70
Tabel 5.18	Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Variabel Perencanaan BMD (X1) Terhadap variabel Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y) dengan Variabel Moderasi 71
Tabel 5.19	Rangkuman Perubahan Berjenjang Model Regresi Perencanaan BMD, Pemeliharaan BMD dan Perilaku Pengguna dan Interaksinya 73

Tabel 5.20	Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Variabel Bebas Pemeliharaan BMD (X2) Terhadap variabel Terikat Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y) dengan Variabel Moderasi Perilaku Pengguna BMD (X3).....	73
Tabel 5.21	Rangkuman Perubahan Berjenjang Model Regresi Pemeliharaan BMD, Moderasi Perilaku Pengguna BMD dan Interaksinya.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 5.1 Grafik Histogram	56
Gambar 5.2 <i>Normal Probability Plot</i>	57
Gambar 5.3 Grafik Sebaran Plot Uji Heterokedastisitas	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak menjadi pemerintah yang otonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mendapatkan kewenangan pada bidang fiskal dan administrasi yang terdesentralisasi. Sebagaimana yang termaktub pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sehingga bermakna kebebasan bagi Pemprov. Sulbar dalam merencanakan, mengalokasikan anggaran dan mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunannya.

Sebagaimana filosofi dasar dari desentralisasi fiskal sedianya pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pengeluaran daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi yang telah dinikmati melalui otonomi daerah oleh Provinsi Sulawesi Barat seharusnya juga dapat meningkatkan pengelolaan aset daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks belanja publik atau pengeluaran pemerintah (*government spending*) untuk barang publik, yang merupakan salah satu konsen dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah kabupaten di Provinsi Sulbar sejauh ini sejak otonomi daerah, telah mengalokasikan belanja modal sebagai bagian dari belanja publik.

Salah satu *output* yang nyata dan terukur dari belanja publik tersebut adalah aset daerah. Aset daerah merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah yang utamanya dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Di

samping berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti hadiah donasi, sumbangan, swadaya, kewajiban pihak ketiga, wakaf, hibah, dan sebagainya.

Aset daerah adalah salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga sistem manajemen aset daerah yang efektif dan efisien adalah salah satu aspek penting yang menunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah.

Selanjutnya seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, desentralisasi tidak hanya sebatas pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan selanjutnya ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Desentralisasi juga diterapkan pengelolaan aset daerah hingga ke level satuan kerja. Jika sebelumnya pengelolaan aset daerah terpusat pada Biro/bagian perlengkapan, maka saat ini pengelolaan aset tersebut didesentralisasikan ke masing-masing SKPD. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola aset - asetnya secara optimal.

Biro Umum merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan di bidang administrasi pimpinan, pelayanan kerumah tanggaan dan fungsi keuangan sekretariat daerah. Luasnya cakupan tugas pada Biro Umum, membuat Biro Umum menjadi pengguna barang terbanyak pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan mengelola barang sebanyak kurang lebih 1.686 item dengan rincian sebagai berikut:

Table 1

Barang Milik Daerah pada Biro Umum

Jenis	Jumlah
Asset lainnya	4
Asset tetap Gedung dan bangunan	51
Aset tetap jalan irigasi dan jaringan	6
Asset tetap lainnya	9
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.608
Asset tetap tanah	1
Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP)	7

Sumber: SIMDA BMD Sulbar 2022

Biro Umum menjadi penanggungjawab atas barang yang menjadi tugas pokok dan fungsi dimulai dari pimpinan dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Staf Ahli Gubernur serta staf pada Biro Umum baik yang melekat secara perorangan maupun penggunaan secara umum yang melekat pada ruang kerja masing - masing. Dengan banyaknya BMD yang dikelola serta anggaran yang dikelola, penulis ingin melihat seberapa efektif penggunaan BMD tersebut apakah berdaya guna dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum.

Dalam perencanaan BMD prinsip dalam perencanaan kebutuhan BMD menurut Permendagri nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman pengelolaan BMD yaitu Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada yang kemudian dituangkan dalam RKBMD. Hanya saja pada kondisi riil dilapangan sangat sulit membedakan antara “kebutuhan” dan

“keinginan”. Rencana pengadaan barang terkadang tidak berdasarkan pada standar barang dan standar kebutuhan. Dalam RKBMD 2017-2021 sangat banyak item rencana pengadaan BMD yang berulang. Permasalahan lain dalam perencanaan kebutuhan adalah terkadang terdapat kebutuhan BMD yang seharusnya diadakan tetapi karena kondisi anggaran yang tidak memungkinkan sehingga kebutuhan barang tersebut tidak dapat direalisasikan.

Sementara itu, pemeliharaan BMD pada Biro Umum Sekretariat Daerah belum optimal. Salah satunya yaitu belum adanya kontrol BMD yang dipelihara dalam bentuk buku kontrol sebagaimana dalam naskah temuan hasil pemeriksaan Kompherensif Inspektorat Tahun 2021, Dari hasil pemeriksaan aspek pengelolaan BMD ditemukan kartu pemeliharaan barang yang belum dibuat oleh pengurus barang. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan tanggungjawab mengenai pemeliharaan barang belum di laksanakan sebagaimana mestinya. Akibatnya, dengan belum adanya kartu kontrol pemeliharaan ini, pemeliharaan barang tidak melalui perencanaan yang matang sehingga bisa terjadi pemborosan biaya pemeliharaan. Juga akan sulit mengidentifikasi BMD apa saja belum menjalani proses pemeliharaan yang terkait dengan standar pemeliharaan BMD yang akan berujung pada tidak efektifnya penggunaan BMD yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro Umum.

Selain menjadi temuan pada pemeriksa internal, permasalahan terkait pemeliharaan juga menjadi temuan hasil pemeriksaan dari pemeriksa Eksternal yakni BPK RI. Berdasarkan hasil pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Tahun 2020 terdapat temuan terkait Pemeliharaan BMD yaitu dokumen Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemeliharaan BMD.

Sehubungan dengan hal determinan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD), sejauh ini Widayanti (2010), Aronggear (2015), Pratama dan Pangayow (2016), Jamaluddin (2017), Hidayati (2016), Sangadji (2018), Ayomi (2014), dan Gaffar dkk telah berupaya untuk melihat beberapa pengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Baik itu pengaruh SDM, legal aset inventarisasi dan sebagainya. Namun demikian belum ada yang lebih spesifik terhadap determinan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dan moderasi perilaku SDM terhadap pengaruh tersebut.

Oleh karena itu sangat penting untuk mempertimbangkan pengaruh perencanaan dan pemeliharaan barang milik daerah terhadap determinan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD). Di samping bagaimana perilaku SDM pengguna memoderasi pengaruhnya terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD). Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) menunjukkan hasil yang berbeda baik itu tidak signifikan, signifikan positif maupun signifikan negatif. Seperti hasil penelitian Gaffar dkk (2017), Arlini dkk (2014), dan Erimalata (2016), yang menunjukkan bahwa SDM berpengaruh positif terhadap pengelolaan aset.

Selanjutnya, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dalam pengelolaan aset daerah sebagai salah satu fokus studi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka masih terdapat celah yang belum terungkap dan diteliti. Seperti pengaruh

perencanaan dan pemeliharaan yang menjadi determinan dalam optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang dimoderasi oleh perilaku SDM pengguna barang milik daerah (BMD) dengan pendekatan prinsip *value for money*.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba menawarkan sebuah pendekatan yang ingin melihat mempertimbangkan pengaruh perencanaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang menjadi Determinan Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD). Selanjutnya, penelitian ini lebih jauh lagi ingin melihat perilaku SDM pengguna barang memoderasi pengaruh kedua faktor tersebut terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD).

1.2 Rumusan Masalah

Provinsi Sulawesi Barat menawarkan sebuah kebaruan kondisi (*novelty*) sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia di era desentralisasi fiskal. Kebaruan ilmiah dalam penelitian untuk melihat pengaruh perencanaan dan pemeliharaan barang milik daerah (BMD) terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) setelah *dimoderasi* oleh perilaku pengguna barang milik daerah (BMD). Oleh karena itu penelitian ini termotivasi oleh beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan barang milik daerah (BMD) berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) ?
2. Apakah pemeliharaan barang milik daerah (BMD) berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) ?
3. Apakah Perilaku Pengguna Barang Milik Daerah (BMD) memperkuat pengaruh perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap optimalisasi

pengelolaan barang milik daerah (BMD)?

4. Apakah Perilaku Pengguna Barang Milik Daerah (BMD) memperkuat pengaruh pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh perencanaan barang milik daerah (BMD) terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD).
2. Pengaruh pemeliharaan barang milik daerah (BMD) terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD).
3. Pengaruh perilaku pengguna barang milik daerah (BMD) dalam memperkuat hubungan Perencanaan barang milik daerah (BMD) terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD)
4. Pengaruh perilaku pengguna barang milik daerah (BMD) dalam memperkuat hubungan Pemeliharaan barang milik daerah (BMD) terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD)

1.4 Kegunaan Teoretis

1. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan daerah mengenai pengelolaan barang milik daerah (BMD). Analisa determinan optimalisasi pegelolaan barang milik daerah (BMD) dengan pendekatan prinsip *value for money* (VFM) untuk melihat pengaruh

perencanaan dan pemeliharaan barang milik daerah (BMD) yang menjadi determinan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) sebelum dan setelah di *moderasi* oleh perilaku pengguna barang milik daerah (BMD).

2. Kegunaan Praktis Dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam penerapan elemen-elemen prinsip *value for money*; ekonomis, efisiensi dan efektivitas terhadap perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah (BMD). Sebagai bagian dari upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
3. Kegunaan Kebijakan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan di Sulawesi Barat dalam hal perencanaan, penganggaran dan penggunaan barang milik daerah (BMD).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas pada determinan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula dengan data perencanaan dan pemeliharaan barang milik daerah (BMD) di Provinsi Sulawesi Barat. Ruang lingkupnya juga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Pengertian dan Peranan Aset Daerah

Aset daerah yaitu mencakup semua kekayaan yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti hadiah donasi, sumbangan, swadaya, kewajiban pihak ketiga, wakaf, hibah, dan sebagainya. Secara garis besar aset daerah dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yakni aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan mencakup kas dan setara kas, piutang, dan surat berharga baik itu berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara aset non keuangan mencakup aset tetap, aset lainnya dan persediaan (Mahmudi, 2010).

Lebih lanjut Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa sistem manajemen aset daerah yang efektif dan efisien adalah salah satu aspek penting yang menunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah. Aset daerah sebagai salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang tidak hanya sebatas pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan selanjutnya ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD), namun juga desentralisasi terhadap pengelolaan aset daerah hingga ke level satuan kerja. Jika sebelumnya pengelolaan aset daerah terpusat pada Biro/bagian perlengkapan, maka saat ini pengelolaan aset tersebut

didesentralisasikan ke masing-masing SKPD. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola aset-asetnya secara optimal.

Lebih jauh lagi aset daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah. Aset daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah ditampilkan pada sisi aset atau aktiva di neraca. Aset daerah yang ditampilkan dalam neraca pemerintah daerah tersebut bersifat *carry-over*, yaitu akan dilaporkan terus pada neraca selama aset itu masih ada. Oleh karena itu jika penatausahaan aset daerah tidak tertib, maka aset yang dilaporkan pada neraca tidak bisa diandalkan. Sehingga neraca tidak mencerminkan nilai aset yang sewajarnya. Aset yang dilaporkan kemungkinan nilainya lebih rendah (*understated*) atau lebih tinggi (*overstated*) dari nilai sesungguhnya. Sehingga laporan keuangan yang disampaikan kurang bisa diandalkan dalam pengambilan keputusan dan berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan (Mahmudi, 2010).

2.1.2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terdapat dua belas unsur dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yaitu:

- a. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga. Perencanaan

kebutuhan barang milik daerah meliputi: 1) Perencanaan pengadaan barang milik daerah. 2) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah. 3) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah. 4) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah. 5) Perencanaan penghapusan barang milik daerah.

- b. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah melalui pengelola barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan (Mardiasmo, 2012).
- c. Penggunaan barang milik daerah mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan secara tahunan. Penggunaan barang milik daerah meliputi: 1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah. 2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah. 3) Penggunaan sementara barang milik daerah. 4) Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- d. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan untuk barang milik daerah yang berada dalam

penguasaan pengelola barang dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.

- e. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi: 1) Pengamanan fisik Pengamanan fisik pada tanah dilakukan dengan memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan. Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan cara membangun pagar pembatas, memasang tanda kepemilikan, melakukan tindakan antisipasi, pemasangan closed-circuit television (CCTV), dan menyediakan satuan pengamanan. Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional. 2) Pengamanan administrasi Pengamanan administrasi pada tanah dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman. Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen. Pengamanan administrasi kendaraan dinas

dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen. 3) Pengamanan hukum Pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat, tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan dengan cara melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), dan mengusulkan penetapan status penggunaan. Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan dengan melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan dinas bermotor.

2.1.3. Prinsip *Value for money*

Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektifitas (Mardiasmo, 2009). Mardiasmo (2009) lebih jauh menjelaskan ketiga elemen VFM yang dikenal dengan sebutan 3E sebagai berikut:

- a. Ekonomi, adalah praktik pembelian barang dan jasa masukan dengan harga yang terbaik yang paling mungkin (*spending less*) dengan tingkat kualitas tertentu. Pengertian ekonomi sering disebut kehematan yang juga mencakup pengelolaan secara cermat dan hati-hati (*prudence*) dan tanpa pemborosan. Suatu kegiatan operasional disebut ekonomis bila mampu menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pendek kata, setiap peningkatan biaya harus diikuti dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.

- b. Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Pada prinsipnya efisiensi merupakan rasio *output* dan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- c. Efektifitas adalah jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari luaran (*output*). Secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut sangat erat kaitannya. Ekonomi membahas mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas hubungan masukan (*input*) dan keluaran (*output*), sementara efektifitas membahas mengenai hubungan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*).

Value for money dapat tercapai jika organisasi menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* yang optimum (Optimal) dalam mencapai tujuan organisasi. Implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan adanya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Sehingga implementasi konsep *value for money* diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2009).

Pengukuran dengan elemen ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pengukuran optimalisasi hanya memperhatikan keluaran yang diperoleh. Efisiensi merupakan hal terpenting dari ketiga pokok elemen tersebut. Pengukuran kinerja efisiensi dapat dibagi menjadi dua:

1. Efisiensi alokasi; efisiensi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas normal.
2. Efisiensi teknis atau manajerial; efisiensi terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu (Mardiasmo, 2002).

Lebih jauh lagi Mardiasmo (2009) menjelaskan VFM adalah inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak diukur pada satu sisi *output* saja. Tetapi juga harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersamaan. Masalah yang sering dihadapi dalam pengukuran kinerja pemerintah adalah *output* tidak selalu berupa keluaran yang berwujud, namun lebih sering berupa *intangible output*.

Oleh karena itu menurut Mardiasmo (2009) untuk dapat mengukur kinerja pemerintah diperlukan indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian. Diperlukan beberapa mekanisme untuk mengukur kinerja seperti berikut ini;

1. Sistem perencanaan dan pengendalian; meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab.
2. Spesifikasi teknis dan standardisasi; kinerja suatu kegiatan, program dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.

3. Kompetensi teknis dan profesionalisme; untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar; terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat pembinaan).
5. Mekanisme sumber daya manusia; pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan mekanisme pengukuran kinerja pemerintah tersebut indikator kinerja banyak terkait dengan SDM. Seperti rantai komando yang jelas berdasarkan tupoksi, kewenangan dan tanggung jawab; personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja; pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang bersifat finansial; serta mekanisme untuk memotivasi staf.

2.1.4. Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* bermula dikemukakan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960an. Melalui publikasi artikelnya '*Toward a Theory of Task Motivation and Incentives*' tahun 1968, Locke menunjukkan adanya

keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang terhadap tugas. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan-tujuan yang sifatnya spesifik dan sulit cenderung menghasilkan kinerja yang lebih kompleks. Pencapaian tujuan dilakukan melalui usaha bersama, meskipun demikian pencapaian tujuan tersebut belum tentu dilakukan oleh banyak orang. Kebersamaan mempunyai dampak positif berupa timbulnya penerimaan (*acceptance*), artinya sesulit apapun tujuan tersebut apabila orang telah menerima suatu pekerjaan, maka akan dijalankan dengan baik (Locke, 1968).

Ada lima prinsip utama yang ada dalam teori ini yakni: 1) Kejelasan, penetapan tujuan harus jelas terukur tidak ambigu dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam menyelesaikan tugas tersebut. 2) Tantangan, salah satu ciri dari penetapan tujuan ini adalah adanya tingkat tantangan dimana seseorang dapat termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya dengan memperhatikan keseimbangan antar penetapan tujuan yang menantang dan penetapan tujuan yang realistis. 3) Komitmen, mengetahui dan memahami akan visi dan misi organisasi secara keseluruhan akan membuat karyawan lebih efektif dalam pencapaian dan penetapan tujuan karena mereka merasa memiliki dan merasa bagian dari penciptaan tujuan tersebut. 4) Umpan balik, memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi dan menyesuaikan kesulitan dalam penetapan tujuan sehingga mendapatkan pengakuan dan menjadikan seseorang dapat menentukan sendiri bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya. 5) Kompleksitas tugas adalah faktor terakhir dalam teori penetapan tujuan ini dimana manajer perlu berhati-hati untuk memastikan bahwa pekerjaan tidak menjadi terlalu berlebihan, karena itu

penting untuk memberikan seseorang waktu yang cukup untuk memenuhi dan meningkatkan kinerjanya. Sediakan waktu yang cukup bagi seseorang untuk berlatih atau mempelajari apa yang diharapkan dan diperlukan untuk berhasil menetapkan tujuan.

Inti dari penetapan tujuan ini adalah untuk memfasilitasi keberhasilan, sehingga dengan pemahaman mendalam mengenai teori ini dapat secara efektif menerapkan prinsip-prinsip untuk tujuan yang akan ditetapkan dan memungkinkan manajemen untuk melakukan diagnosis kesiapan dalam mengatasi suatu problema. Selain itu seseorang diberikan kesempatan untuk membuat penilaiannya sendiri mengenai hasil-hasil operasi, artinya jika mereka membicarakan hasil maka sebenarnya seseorang tersebut menilai dirinya sendiri dan mungkin sekali mendapatkan wawasan mendalam bagaimana mereka harus memperbaiki sikapnya, cara, dan prilakuannya (Locke, 1996).

Latham (2008) yang mempelajari efek dari penetapan tujuan di tempat kerja mendukung persis apa yang telah dikemukakan oleh Locke mengenai hubungan tak terpisahkan antara penetapan tujuan dan kinerja. Sehingga pada tahun 1990, Locke dan Latham menerbitkan karya bersama mereka '*A Theory of Goal Setting and Task Performance*'.

Chong (2002) menyatakan bahwa keterlibatan bawahan atas keputusan yang sudah dibuat dapat meningkatkan komitmen bawahan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan teori Locke (1968) yang mengatakan bahwa peningkatan kinerja akan lebih besar melalui penetapan tujuan partisipasi dibandingkan penetapan tujuan tanpa partisipasi, karena partisipasi mengarahkan

pegawai terhadap penerimaan yang lebih besar akan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan memengaruhi kinerja. Adanya tujuan individu menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukan, semakin tinggi komitmen pegawai terhadap tujuan akan mendorong pegawai tersebut untuk melakukan usaha yang lebih keras dalam mencapai tujuan tersebut. *Goal setting theory* mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan. Komitmen untuk mencapai tujuan dapat ditimbulkan dari partisipasi anggota dalam penetapan tujuan organisasi (Locke 1968). (Chong, 2002)

Indaryanto (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan tingkat motivasi tertinggi dari para karyawan, sebaiknya mempertanyakan apakah tujuan organisasi telah dimengerti oleh semua anggota, apakah tujuan organisasi yang dicapai telah cukup jelas, sehingga proses partisipatif dan program *management by objective* (MBO) bisa berjalan dengan baik. Seseorang yang telah menetapkan tujuan atas perilakunya dimasa depan akan memengaruhi terhadap perilakunya sehari-hari. Perilaku sehari-hari tersebut akan diatur oleh ide dan pemikiran serta niat sehingga akan memengaruhi tindakannya dan konsekuensi atas tujuan yang telah ditetapkan akan meningkatkan kinerjanya. (Indaryanto, 2008)

Goal setting theory berasumsi bahwa terdapat hubungan langsung antara tujuan yang spesifik dan terukur dengan kinerja. Latham *et al.*, (2008) menemukan bahwa *goal setting* berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam organisasi publik, salah satu bentuk nyata dari penerapan *goal setting* ini adalah anggaran. Sebuah anggaran tidak hanya berisi rencana dan jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan

kegiatan tetapi juga berisi sasaran spesifik yang ingin dicapai organisasi. (Latham, 2008).

Secara singkat dalam teori tersebut dijelaskan bahwa proses penetapan tujuan akan mempengaruhi kinerja orang-orang yang dituntut mencapai tujuan tersebut. Ketika sebuah tujuan dirancang, maka orang-orang yang terlibat didalam penetapan tujuan akan berkomitmen terhadap tujuan yang ditetapkan dan akan memiliki rasa tanggungjawab untuk mencapainya.

2.1.5. Teori Kontingensi

Teori kontingensi merupakan suatu teori kesesuaian yang bermakna menyesuaikan dengan kondisi yang tepat. Dimana terdapat beberapa keterlibatan dari variabel yang ada, salah satunya adalah variabel moderasi, yaitu suatu variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Hubungan tersebut juga bisa menghasilkan hubungan negatif atau positif tergantung pada variabel yang memoderasinya. Teori kontingensi didasarkan pada premis bahwa tidak ada suatu sistem yang secara universal tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan. Tetapi sistem tersebut bergantung pada faktor-faktor situasional dalam organisasi tersebut (Otley, 1980).

Lebih jauh lagi Brownell (1982) telah menemukan pengaruh faktor kondisional sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Faktor kondisional tersebut dikelompokkan ke dalam empat variabel yaitu kultur, organisasional, interpersonal, dan individual.

Pendekatan kontingensi pada penelitian ini ditujukan agar dapat menjelaskan dan menguji apakah faktor perencanaan dan pemeliharaan BMD

melalui perilaku pengguna Barang Milik daerah (BMD) sebagai moderasi dapat berpengaruh terhadap determinan optimalisasi pengelolaan BMD.

2.1.6 Efektivitas Pengelolaan BMD

Ekasari (2020) menjelaskan pengertian efektivitas yaitu berhubungan dengan keluaran (output) dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dalam KBBI, efektivitas diberi arti sebagai sesuai yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau Tindakan, hal ini menunjukkan efektifitas dapat dilihat dari tercapainya tujuan instruksional khusus yang dicanangkan. Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur ke efektifan organisasi antara lain:

1. Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:27-29) mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.
2. Robbin (199:58) membagi kedala empat pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

Jadi teori efektivitas sangat terkait dengan teori penetapan tujuan (*Goal Setting*), sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.2. Tinjauan Empiris

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan hal determinan optimalisasi pengelolaan barang

milik daerah (BMD). Sejauh ini beberapa peneliti telah berupaya untuk melihat beberapa pengaruh terhadap determinan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Baik itu pengaruh SDM, legal aset inventarisasi dan sebagainya. Namun demikian belum ada yang lebih spesifik terhadap determinan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dengan moderasi perilaku SDM terhadap pengaruh tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh terhadap determinan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD). menunjukkan hasil yang berbeda baik itu tidak signifikan, signifikan positif maupun signifikan negatif.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
Widayanti (2010)	Variabel dependen: Optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) Variabel independen: inventarisasi, identifikasi, dan penilaian aset	Inventarisasi, identifikasi, dan penilaian aset secara signifikan mempengaruhi optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan)
Aronggear (2015)	Variabel dependen: optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) Variabel independen: inventarisasi, penilaian aset, pemeliharaan, pengawasan serta pengawasan dan pengendalian	optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) dipengaruhi secara signifikan oleh inventarisasi, penilaian aset. Sementara variabel independen lainnya yaitu pengawasan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian menunjukkan hasil yang tidak signifikan
Pratama dan Pangayow (2016)	Variabel dependen: optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) Variabel independen: inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, serta	Inventarisasi aset dan penilaian aset tidak mempengaruhi optimalisasi aset. Sementara legal audit dan pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset.

Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	pengawasan dan pengendalian aset	
Jamaluddin (2017)	Variabel dependen: manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) Variabel independen: inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset	Legal audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen aset tetap (tanah dan bangunan). Sementara inventarisasi aset dan penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset tetap (tanah dan bangunan).
Hidayati (2016)	Variabel dependen: optimalisasi aset Variabel independen: inventarisasi aset, identifikasi aset, legal audit, dan penilaian aset	Variabel inventarisasi aset, dan legal audit berpengaruh positif dan signifikan pada alpha 5% terhadap optimalisasi aset. Sementara Variabel identifikasi aset, dan penilaian aset berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada alpha 5% terhadap optimalisasi aset.
Sangadji (2018)	Variabel dependen: legal audit dan penilaian aset. Variabel independen: inventarisasi aset. Metode analisis dengan <i>Partial Least Square – Structural Equation Modeling</i> (PLS- SEM).	Legal audit dan penilaian aset dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan inventarisasi aset.
Ayomi (2014)	Variabel dependen: optimalisasi aset (tanah dan bangunan). Variabel independen: inventarisasi aset, legal audit, dan penilaian aset.	Inventarisasi aset tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan). Legal audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan, sementara penilaian aset menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan).
Gaffar dkk (2017)	Variabel dependen: optimalisasi aset. Variabel independen: inventarisasi aset dan sumber daya manusia. Variabel moderasi: Sistem informasi Metode analisis dengan <i>Moderated</i>	Inventarisasi aset berpengaruh negative terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Sementara sistem informasi memoderasi (memperkuat) inventarisasi aset, dan sistem informasi memoderasi (memperlemah) sumber daya manusia terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Regression Analysis (MRA).</i>	
Arlini M., Darwanis & Abdullah S. (2014).	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Dependen : Manajemen Aset - Variabel Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, dan Kompensasi Pengujian menggunakan regresi linier berganda	Semua Variabel Independen, baik secara Parsial maupun Simultan berpengaruh Positif Terhadap Variabel Dependen
Astini (2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Dependen : Efektifitas Manejemen Aset Tetap - Variabel Independen : Sistem Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern - Variabel Moderasi : Kualitas Aparatur - Dengan Metode Analisis (moderated regression analysis) MRA.	Sistem Informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektifitas majenemen aset tetap, Sistem pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas manajemen aset tetap, serta kualitas aparatur memoderasi pengaruh sistem informasi dan sistem pengendalian intern pada efektifitas manajemen aset tetap.
Erimalata S. (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Dependen : Kualitas Informasi Aset Tetap, Kepuasan Pengguna, dan Pengendalian Organisasi - Variabel Independen : Kualitas SIMDA BMD, Kepuasan Pengguna, Pengendalian Organisasi, dan Kualitas Informasi Aset Tetap - Dengan Metode Analisis Structural Equation Model (SEM)	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas SIMDA BMD berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan pengendalian organisasi - Hubungan timbal balik antara pengendalian organisasi kualitas informasi aset tetap -Tidak ada hubungan timbal balik antara kepuasan pengguna dan kualitas informasi aset tetap
Yonatal P tabita (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Dependen: Efektivitas Pengelolaan BMD - Variabel Independen: Kompetensi SDM dan 	- SDM dan Kualitas Sistem Informasi Berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan BMD

Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Kualitas Sistem Informasi - Metode MRA (Moderate Regression Analysis)	- Komitmen Pimpinan memoderasi Pengaruh SDM Terhadap efektivitas Pengelolaan BMD Komitmen pimpinan tidak memoderasi pengaruh Kualitas Sistem Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan SDM

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terutama difokuskan pada perencanaan dan pemeliharaan BMD yang merupakan bagian dari beberapa tahapan pada siklus manajemen aset daerah. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana faktor perilaku pengguna Barang Milik Daerah (BMD) dapat memoderasi hubungan perencanaan dan pemeliharaan terhadap optimalisasi pengelolaan Barang Milik daerah (BMD).

Teori utama yang digunakan dalam merancang penelitian ini adalah teori *goal setting* dan Efektivitas. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi pencapaian target optimalisasi pengelolaan BMD sebagai tujuan dari pengelolaan aset daerah yang telah ditetapkan. Konsep dasar teori ini adalah bagaimana seseorang memahami tujuan organisasinya dengan kata lain apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Teori ini juga menetapkan bahwa perilaku seseorang diatur oleh pemikiran dan niatnya, bila seseorang berkomitmen untuk mencapai tujuannya maka hal tersebut akan mempengaruhi tindakannya yang konsekuensinya berakibat pada pencapaian target, tantangan yang sulit membuat seseorang bisa meningkatkan kinerjanya tentu dengan memiliki kemampuan dan keterampilan kerja.

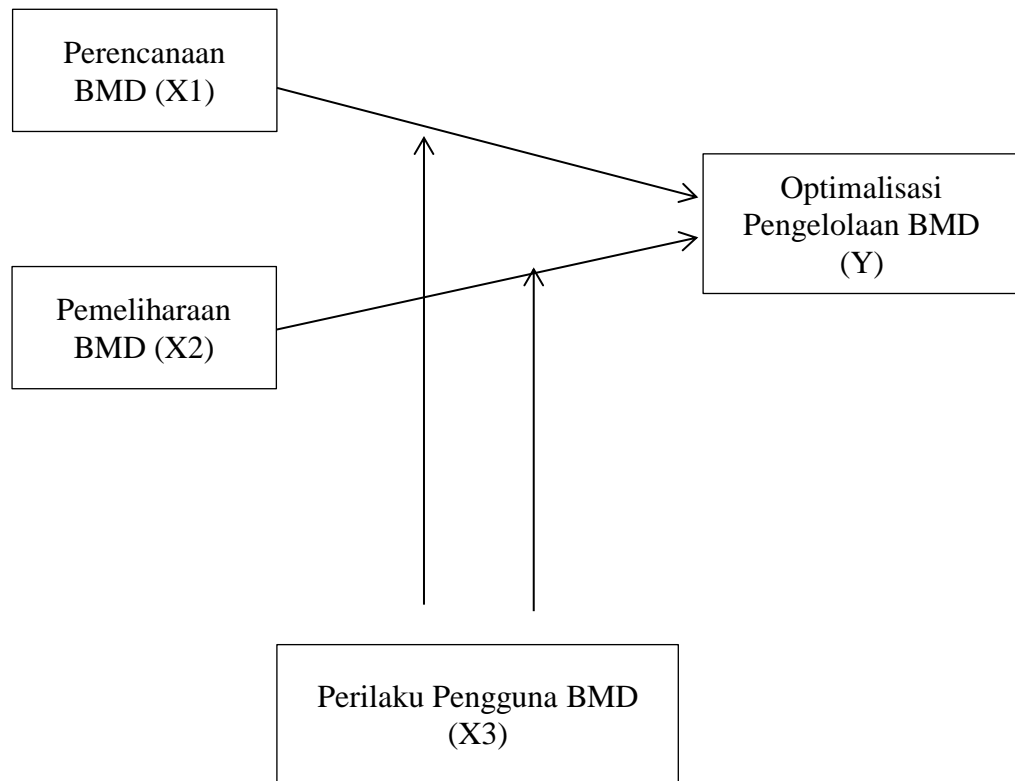
Hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta variabel yang memoderasinya, didasarkan pada teori, studi empiris dan rasionalisasi penulis. Lebih jelasnya hubungan tersebut dapat diterangkan berikut ini, yaitu,

pertama, perencanaan BMD sebagai bagian dari tahapan siklus pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD. Kedua, pemeliharaan BMD berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD.

Selanjutnya, perilaku pengguna BMD memoderasi pengaruh perencanaan dan pemeliharaan BMD terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah BMD. Hal tersebut disebabkan jika perilaku pengguna BMD menerapkan prinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisien dan efektif maka meningkatkan pengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan BMD.

Merujuk pada premis-premis tersebut, maka dapat dirancang suatu model penelitian yang menggambarkan bagaimana faktor perilaku pengguna BMD dapat memoderasi hubungan perencanaan dan pemeliharaan terhadap optimalisasi pengelolaan BMD.

Keterangan lebih lanjut mengenai kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1. Kerangka Konseptual

3.2. Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Perencanaan terhadap optimalisasi Pengelolaan BMD

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategi, taktis dan melibatkan aspek operasional, juga berperan dalam pemberian informasi histories dan prospektif. Proses perencanaan melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2002). Asmarani (2006) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses sistematis yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara

stakeholder utama tentang prioritas yang hakiki bagimisinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi.

Perencanaan khususnya digunakan untuk mempertajam fokus organisasi agar semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi organisasi tersebut dengan menekankan pada pentingnya membuat keputusan-keputusan yang menempatkan organisasi untuk berhasil menanggapi perubahan lingkungan itu. Teori *goal setting* dan Efektivitas menunjukkan bahwa penetapan tujuan yang jelas cenderung memberikan hasil yang maksimal.

Disamping itu, pengelolaan BMD sebagai bagian dari pengelolaan organisasi sektor publik dapat optimal jika perencanaan BMD menerapkan elemen VFM, ekonomis, efisien dan efektif. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Perencanaan BMD diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD)

3.2.2 Pengaruh Pemeliharaan terhadap optimalisasi Pengelolaan BMD

Pemeliharaan BMD ditujukan untuk memperpanjang umur ekonomis BMD. Tentunya sejalan dengan prinsip *value for money* dimana elemen ekonomi, efisien dan efektifitas dapat tercapai. Terutama dari segi efisien. Karena rentang waktu dari segi manfaat semakin panjang. Sehingga berdampak pada manfaat (*output*) secara akumulasi yang lebih besar. Oleh karena itu penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pemeliharaan BMD diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan BMD

3.2.3 Pengaruh Perencanaan Terhadap optimalisasi Pengelolaan BMD setelah di moderasi oleh Perilaku Pengguna BMD

Teori *goal setting* menunjukkan bahwa umpan balik dan kompleksitas tugas dalam mencapai tujuan akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengklarifikasi dan menyesuaikan kendala yang dihadapi agar seseorang dapat menentukan sendiri bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya. Seseorang diberikan kesempatan untuk membuat penilaiannya sendiri mengenai hasil-hasil operasi. Maknanya jika seseorang membicarakan hasil maka sebenarnya dia menilai dirinya sendiri dan mungkin sekali mendapatkan wawasan mendalam bagaimana mereka harus memperbaiki sikapnya, cara, dan perilakuannya (Locke, 1996). Tentunya hal ini menunjukkan peran dari perilaku pengguna BMD dalam menjamin terwujudnya Determinan optimalisasi pengelolaan BMD. Perilaku pengguna BMD berdasarkan teori *goal setting* juga dapat menentukan penerapan elemen ekonomi, efisien, dan efektif pada Prinsip *value for money* dalam pengelolaan BMD.

Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Perencanaan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan BMD setelah *dimoderasi* oleh perilaku pengguna barang.

3.2.4 Pengaruh Pemeliharaan Terhadap Optimalisasi Pengelolaan BMD Setelah *dimoderasi* oleh Perilaku Pengguna BMD

Teori *goal setting* dan Efektivitas menunjukkan bahwa umpan balik dan kompleksitas tugas dalam mencapai tujuan akan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengklarifikasi dan menyesuaikan kendala yang dihadapi agar seseorang dapat menentukan sendiri bagaimana mereka menyelesaikan tugasnya. Seseorang diberikan kesempatan untuk membuat penilaiannya sendiri mengenai hasil-hasil operasi. Maknanya jika seseorang membicarakan hasil maka sebenarnya dia menilai dirinya sendiri dan mungkin sekali mendapatkan wawasan mendalam bagaimana mereka harus memperbaiki sikapnya, cara, dan perilakuannya (Locke, 1996). Tentunya hal ini menunjukkan peran dari perilaku pengguna BMD dalam menjamin terwujudnya determinan optimalisasi pengelolaan BMD. Perilaku pengguna BMD berdasarkan teori *goal setting* juga dapat menentukan penerapan elemen ekonomi, efisien, dan efektif pada Prinsip *value for money* dalam pengelolaan BMD. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pemeliharaan BMD diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Optimalisasi pengelolaan BMD setelah *dimoderasi* oleh perilaku pengguna barang.